

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah selalu dituntut untuk melaporkan berbagai kegiatan selama satu tahun berjalan, yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan harus berkualitas baik dari segi informasi ataupun penulisan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban, sehingga harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan (Mahmudi, 2016).

Kerangka konseptual PP No. 71 tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan seperti halnya akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan evaluasi kerja. Akuntabilitas merupakan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Didah Nurjanah, 2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan equitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Keseimbangan antargenerasi adalah membantu pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelajaran untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan menanggung beban pengeluaran tersebut (Harahap, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Dalam mengukur berhasil atau tidaknya pengelolaan keuangan sebuah organisasi pemerintahan dilihat pada pengelolaan keuangannya yang baik dan dapat memberikan kepastian tentang suatu kegiatan di mana pemerintah nantinya akan melakukan berbagai usaha untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan transparansi (Devi Oktia Ruspina, 2013). Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memberikan kepastian mengenai keberhasilan suatu kegiatan yang mencakup semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim et al., 2007).

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Namun lain halnya ketika BPK mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), akan diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, (Didah Nurjanah, 2022)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan (Haryanto & Hanifah, 2019). Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan dalam tahap pemeriksaan yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak memberi opini (Harahap, 2018).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan Opini tersebut, Jawa Barat sepuluh kali berturut-turut mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa barat. Dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, terdapat dua Kabupaten dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Ridwan mengungkapkan akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat Pengelolaan Keuangannya harus paripurna dan baik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (Pikiran rakyat, 2020).

**Tabel 1. 1 Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP

(Sumber : *bpka.bandung.go.id*, 2021).

Dari Fenomena lainnya juga didapatkan bahwa pada tahun 2018 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia masih rendah, padahal

Didah Nurjanah, 2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Nunuy (2018), IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Dalam suatu instansi pemerintahan kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. (Sumber: [republika.co.id](http://republika.co.id), 2018).

Dari fenomena yang terjadi di atas, pihak pemerintah perlunya mengantisipasi untuk tidak terjadi kembali opini WDP seperti halnya opini dari BPK pada tahun 2018. Dengan itu, Pemerintah harus selalu menghasilkan laporan keuangan yang baik dengan hasil dari kinerja pemerintahan yang diperiksa oleh BPK.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu Standar Pengendalian Internal (SPI) (Grani Ramadhani Kusumo, 2018; Yohanes Suhardjo, 2019; dan Dito Aditia Darma Nasution, 2019), Sumber Daya Manusia (SDM) (Rizki Afri Mulia, 2018 dan Dito Aditia Darma Nasution, 2019), Gaya kepemimpinan (Tut Madiguna Agung dan Gayatri, 2019), pemanfaatan teknologi informasi (Dito Aditia Darma Nasution, dan Tut Madiguna Agung dan Gayatri, 2019). Standar Akuntansi Pemerintahan, penelitian yang dilakukan oleh Grani Ramadhani Kusumo (2018) dan Dito Aditia Darma Nasution (2019). Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan penelitian oleh Dito Aditia Darma Nasution (2019). *Good governance* yang dilakukan penelitian oleh Vika Erinna AgustiningTyas (2020). dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilakukan penelitian oleh Grani Ramadhani Kusumo (2018) dan Dito Aditia Darma Nasution (2019) .

Laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam tahap membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dengan itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai dengan karakteristik yang memadai, maka kemungkinan akan terjadinya kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah.

Didah Nurjanah, 2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan Undang-undang perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads 1928, yang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas. Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yaitu manual administrasi keuangan pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengembangan akuntansi ditingkat pemerintah daerah telah beroperasi melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun (1986), setelah beberapa tahun Indonesia menggunakan Undang-undang di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial, maka pada abad ke-21 telah diterapkannya tiga paket Perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan peundang-undangan No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggungjawab dan pengelolaan Keuangan Negara.

Pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Dalam mengelola keuangan, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pemerintahan daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya bentuk transparansi dan akuntabilitas. pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Sebagaimana pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang

*Didah Nurjanah, 2022*  
***PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)***

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

telah direvisi menjadi Nomor 59 Tahun 2007. Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan perubahan kedua dengan mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas sesuai PP 105/2000 Pasal 38. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Sistem Akuntansi Pemerintah harus dirancang dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara, Sistem Akuntansi Pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, dan Sistem Akuntansi Pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan instrumen yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Putra & Lau, 2020).

Menteri dalam negeri telah memberikan pedoman teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah yang mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan

Didah Nurjanah, 2022

***PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)***

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Pembahasannya perlu dijelaskan terhadap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya (Putra & Lau, 2020).

Berkaitan dengan fenomena dan uraian di atas, hasil penelitian Eka Puteri Ardianti (2018) mengenai Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shintami Oktavia dan Sri Rahayu (2019) dari penelitian tersebut juga diperoleh hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, penelitian lainnya dilakukan oleh Nuraini Ismail, Apriana Marselina dan Elsensiana Bupu Loda (2021) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ira Gustina (2021) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Seangkan penelitian yang dilakukan oleh Elfina Yanti dan Salfadri (2020) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian Kartika Dwi Indrayani & Harjanti Widiastuti (2020) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Elfina Yanti dan Salfadri (2020) Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar, dari penelitian tersebut diperoleh hasil sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Didah Nurjanah, 2022

*PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)*

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Seiring berkembangnya teknologi dan ekonomi suatu negara pastinya mengharapkan pemerintahan yang baik atau dengan kata lain disebut dengan *Good governance*. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini, lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik juga dapat dilihat dari pemerintahan yang berhasil dalam menjalankan tugas untuk membangun suatu negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan (Permana Irvan, 2011).

*Good governance* sebagai salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political Framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009). *Good governance* juga dapat menjadi acuan dalam upaya untuk menjalankan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, untuk membawa tingginya aspek pemenuhan hak rakyat, disertai sifat solidaritas, keadilan nilai, dan adanya penekanan Hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kegiatan pada suatu negara.

*Good governance* sebagai ideologi politik untuk membuat pokok prinsip mengenai pemerintahan untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Sebuah pelanggaran dalam menyajikan laporan keuangan masih selalu terjadi, seperti halnya melakukan pemalsuan laporan keuangan. Dengan hal ini, terbukti bahwa betapa pentingnya aktivitas akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal dengan baik dalam sebuah perusahaan. Penerapan *Good governance* dapat menghasilkan kegiatan pemerintah yang bersih dan baik, sebagaimana *Good governance* mampu berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di lingkungan pemerintahan itu sendiri maupun daerah dan juga hubungannya dengan *stakeholders* yang ada (Yusniyar, Darwanis dan Syakriy, 2016).

Fenomena yang berkaitan dengan *Good governance* yaitu Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang menempati urutan yang tinggi dalam tindakan korupsi. Diantaranya terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Contohnya mengenai kasus penyalahgunaan penggunaan anggaran belanja dan mark up BBM (bahan bakar minyak) untuk kepentingan pribadi pada tahun 2016 oleh kepala seksi kemitraan, Staf UPT (unit pelayanan teknis) kebersihan dan

Didah Nurjanah, 2022  
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



mantan Kasubag tata usaha UPT kebersihan yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup KBB, pada tahun 2018 Korupsi Bupati Bandung Barat KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 435 juta, korupsi di kecamatan Lembang oleh kepala dan bendahara UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, dan suap yang melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB tahun 2018 (Salman, Dian, 2020).

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian hasil kerja atau pengelolaan keuangan meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Kinerja dalam keuangan pemerintah daerah merupakan hasil output pencapaian kinerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan digunakan untuk pembangunan daerah yang dicantumkan dalam laporan anggaran dan realisasi bentuk nominal maupun realisasi pembangunan. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menemukan pelayanan yang baik kepada publik (Mardiasmo, 2009).

Contoh kasus yang telah ada maka diperlukan pengadaan anggaran terhadap setiap instansi. Oleh karena itu, salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan *Good governance*. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah mengeluarkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah, Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, melainkan informasi tersebut memiliki fungsi yang penting untuk pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

Hasil riset sebelumnya mengenai *Good governance* di Indonesia, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktarina Kharis Raharjo (2016), diperoleh hasil bahwa *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Vika Erinna AgustiningTyas (2020) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh I Gede Agus Junyantara dan I Putu Deddy Samtika Putra (2021) yang dilakukan penelitian di Denpasar, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa *Good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. Penelitian lainnya juga

Didah Nurjanah, 2022  
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan oleh Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum dan Sriyono (2020), pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diperoleh hasil bahwa *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Miranda Miryam Maramis, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas (2018). Penelitian pada pemerintah Kota Manado *Good governance* terdapat bahwa mempunyai pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah Kota Manado, yang berarti bagusnya penerapan *good governance* maka semakin bagus pula kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Puteri Ardianti (2018) pada Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul, membuktikan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Amiroh Zumar Hanifah dan Haryanto (2021) diperoleh hasil bahwa *Good Governance* kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Meidylysa Patty (2019) diperoleh hasil bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian menurut Mia Oktarina Kharis Raharjo, SE, M.Si, Ak Rita Andini, SE, MM (2016), I Gede Agus Junyantara dan I Putu Deddy Samtika Putra (2021), Vika Erinna AgustiningTyas (2020), terdapat *Good governance* berpengaruh signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Eka Puteri Ardianti (2018) menyatakan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Amiroh Zumar Hanifah Dan Haryanto (2021) menyatakan hasil *Good governance* kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Shintami Oktavia, Sri Rahayu (2019) Uji simultan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menurut penelitian Elfina Yanti dan Salfadri (2020) sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Didah Nurjanah, 2022

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun alasan meneliti Dinas di Kabupaten Bandung Barat karena sesuai dengan fenomena mengenai kasus penyalahgunaan penggunaan anggaran belanja dan mark up BBM untuk kepentingan pribadi pada tahun 2016 oleh kepala seksi kemitraan, Staf UPT (unit pelayanan teknis) kebersihan dan mantan Kasubag tata usaha UPT kebersihan yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup KBB dan korupsi di kecamatan Lembang oleh kepala dan bendahara UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, dan suap yang melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB tahun 2018.

Dengan adanya uraian di atas bahwa terdapat perbedaan atau inkonsistensi dengan hasil riset sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis terdorong untuk meneliti kembali mengenai masalah lebih dalam kembali dengan menuangkan Objek Penelitian yang dilakukan berbeda sehingga penulis menarik sebuah Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian dari penelitian yang saya teliti ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Penerapan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya. adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama di bidang sistem akuntansi keuangan daerah dalam kualitas laporan keuangan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama di bidang *Good governance* dalam kualitas laporan keuangan.
4. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang beberapa hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan/referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan daerah.
3. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah kota yang diteliti dengan kualitas laporan keuangan daerah.